

PERKEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN MENTAL DI INDONESIA: Tren, Tantangan, dan Arah Kebijakan

Riska Fadila Putri^{1*}

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

riskafadilaputri02@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Recieved: 2025

Revised: 2025

Accepted: 2025

Keyword:

Mental Health

Development;

Community-Based Services;

Task-Shifting;

ABSTRACT

This article explores the development of mental health services in Indonesia by examining current trends, persistent challenges, and future policy directions. The main objective is to provide a comprehensive overview of how mental health services have evolved, what structural and social barriers remain, and what strategies are needed to strengthen the system. The method applied is a qualitative literature review, analyzing national and international journal articles, government documents, and open-access reports published in recent years. A thematic synthesis approach was used to categorize findings into key themes, including policy development, community-based services, *task-shifting* to non-specialist health workers, the integration of digital health interventions, and human rights issues. The study results highlight that Indonesia has made progress through national action plans and the integration of mental health into primary care. Emerging trends include the increasing role of community cadres, the adoption of online counseling platforms, and the expansion of digital health applications to reduce treatment gaps. Nevertheless, challenges persist, such as limited mental health professionals, uneven distribution of services, persistent stigma, weak regulatory frameworks, and data protection concerns in digital interventions. In conclusion, strengthening Indonesia's mental health system requires a holistic approach that combines community empowerment, digital innovation, regulatory reform, and human rights protection. Aligning national strategies with the *Universal Health Coverage* (UHC) and *Sustainable Development Goals* (SDGs) is essential to ensure equitable, sustainable, and inclusive mental health services for all.

How to Cite:

Putri, R. F. (2025). Perkembangan Layanan Kesehatan Mental Di Indonesia: Tren, Tantangan, Dan Arah Kebijakan. *Interface: Journal of Multidiciplinary*, 1(1), 37- 47

INTRODUCTION

Kesehatan mental telah menjadi isu kesehatan publik yang semakin mendapat perhatian global, termasuk di Indonesia. *World Health Organization* (2022) dalam *Mental Health Atlas* menunjukkan bahwa meski terdapat peningkatan komitmen pemerintah terhadap kesehatan jiwa, kapasitas layanan di Indonesia masih terbatas baik dari sisi jumlah fasilitas maupun tenaga kesehatan profesional. Hal ini berimplikasi pada kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan layanan kesehatan mental yang memadai (World Health Organization, 2022).

Basrowi *et al.* (2024) menegaskan bahwa isu kesehatan mental di Indonesia mencakup beragam aspek, mulai dari keterbatasan akses layanan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan jiwa, hingga rendahnya literasi masyarakat tentang kesehatan mental. Salah satu permasalahan klasik adalah praktik pasung bagi penderita gangguan jiwa, yang meskipun telah dilarang, masih ditemukan di berbagai wilayah. Studi Tyas *et al.* (2024) menunjukkan bahwa program penghapusan pasung menghadapi tantangan implementasi, terutama karena keterbatasan layanan berbasis komunitas dan dukungan sosial (Basrowi *et al.*, 2024; Tyas *et al.*, 2024).

Dalam upaya memperluas jangkauan layanan, muncul strategi *task-shifting*, yaitu pelibatan tenaga kesehatan non-spesialis seperti perawat atau kader komunitas. Susanti *et al.* (2024) menggambarkan peran penting kader kesehatan mental di komunitas terpencil, meski menghadapi kendala pelatihan dan supervisi. Efendi *et al.* (2022) juga menemukan bahwa keberhasilan *task-shifting* sangat bergantung pada dukungan kebijakan, kejelasan peran, serta penerimaan dari pemangku kepentingan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru melalui layanan konseling daring dan aplikasi kesehatan mental. Meta-analisis oleh Kim *et al.* (2023) serta Mudiyansele *et al.* (2024) menunjukkan efektivitas intervensi digital dalam menurunkan depresi dan kecemasan, walaupun isu keamanan dan perlindungan data tetap menjadi perhatian (Susanti *et al.*, 2024; Efendi *et al.*, 2022; Kim *et al.*, 2023; Mudiyansele *et al.*, 2024; Taher *et al.*, 2023).

Tantangan lain yang masih dihadapi adalah tingginya stigma terhadap gangguan jiwa di masyarakat. Stigma ini sering membuat penderita enggan mencari bantuan dan berujung pada keterlambatan penanganan. Basrowi *et al.* (2024) menekankan bahwa rendahnya literasi kesehatan mental berkontribusi terhadap diskriminasi dan pengucilan sosial terhadap penderita, yang pada akhirnya memperburuk kondisi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan layanan kesehatan mental tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga harus mencakup strategi edukasi publik untuk mengubah cara pandang masyarakat (Basrowi *et al.*, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan upaya melalui Rencana Aksi Nasional Kesehatan Jiwa serta integrasi layanan kesehatan mental di fasilitas primer. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, baik dari segi sumber daya manusia maupun koordinasi antar lembaga. Efendi *et al.* (2022)

mencatat bahwa meskipun *task-shifting* menjadi salah satu strategi yang diadopsi, kebijakan pendukung dan regulasi yang jelas masih sangat diperlukan agar peran tenaga non-spesialis dapat berjalan efektif. Lebih jauh lagi, kajian hukum mengenai kesehatan mental menyoroti perlunya reformasi regulasi agar layanan lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan pasien (Efendi *et al.*, 2022).

Yusrani *et al.* (2023) dalam tinjauannya menegaskan bahwa arah kebijakan kesehatan mental di Indonesia perlu diselaraskan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Universal Health Coverage* (UHC). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dari komitmen global, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan layanan yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat (Yusrani *et al.*, 2023).

Honey *et al.* (2023) melalui *literature review* mengenai Puskesmas menunjukkan bahwa promosi dan pencegahan kesehatan mental belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, metode, dan infrastruktur. Hal ini selaras dengan temuan Susanti *et al.* (2024) yang menyoroti peran kader kesehatan mental di lapangan, di mana mereka menghadapi kendala pelatihan dan supervisi. Oleh karena itu, strategi berbasis komunitas tetap menjadi elemen penting yang harus diperkuat untuk memperluas jangkauan layanan (Honey *et al.*, 2023; Susanti *et al.*, 2024).

Sejalan dengan tren global, penggunaan teknologi digital untuk mendukung layanan kesehatan mental juga semakin berkembang. Ihsanuddin & Kurniawan (2025) dalam kajian literturnya menekankan bahwa intervensi digital di Indonesia dinilai fleksibel dan terjangkau, namun masih menghadapi tantangan dari sisi kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Hal ini memperkuat temuan meta-analisis Kim *et al.* (2023) serta Mudiyansele et al. (2024) yang menegaskan efektivitas intervensi digital dalam menurunkan depresi dan kecemasan, meski persoalan keamanan data dan keselamatan pengguna tetap menjadi isu krusial (Ihsanuddin & Kurniawan, 2025; Kim *et al.*, 2023; Mudiyansele et al., 2024; Taher *et al.*, 2023).

Sebuah *systematic review* oleh Widyatmoko *et al.* (2024) menemukan bahwa efektivitas intervensi kesehatan mental di Indonesia masih bervariasi. Beberapa program berhasil, tetapi banyak yang menghadapi hambatan implementasi akibat keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa strategi *task-shifting* maupun intervensi berbasis komunitas memerlukan kebijakan yang lebih kokoh agar hasilnya dapat berkelanjutan (Widyatmoko *et al.*, 2024).

Dari sisi hak asasi manusia, kajian internasional yang dilakukan oleh Minas *et al.* (2009) menunjukkan bahwa perlindungan HAM bagi orang dengan gangguan mental di Indonesia tidak cukup hanya bergantung pada undang-undang. Implementasi yang lemah seringkali menyebabkan pelanggaran hak pasien, termasuk praktik pasung dan diskriminasi. Hal ini menggarisbawahi bahwa

kebijakan kesehatan mental harus terintegrasi dengan prinsip HAM dan perlindungan sosial agar tidak hanya sekadar normatif di atas kertas (Minas *et al.*, 2009).

Perkembangan global juga menunjukkan adanya transformasi layanan kesehatan mental ke arah berbasis komunitas dan teknologi digital. Studi Mudiyansele et al. (2024) menekankan bahwa kombinasi intervensi digital dengan tenaga non-spesialis dapat menjadi solusi efektif bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keterbatasan tenaga ahli. Akan tetapi, aspek keamanan, kerahasiaan data, dan keselamatan pengguna sebagaimana diperingatkan oleh Taher *et al.* (2023) perlu menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan dan pengembangan aplikasi kesehatan mental (Mudiyansele et al., 2024; Taher *et al.*, 2023).

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pengembangan layanan kesehatan mental di Indonesia tidak hanya membutuhkan inovasi layanan, tetapi juga arah kebijakan yang jelas dan berbasis hak asasi manusia. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, mengurangi stigma sosial, dan memperluas akses melalui pemanfaatan teknologi digital maupun penguatan layanan komunitas. Oleh karena itu, kajian mengenai tren, tantangan, dan arah kebijakan layanan kesehatan mental di Indonesia menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi terkini sekaligus rekomendasi bagi penguatan sistem kesehatan jiwa nasional.

METHODS

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai perkembangan layanan kesehatan mental di Indonesia (Creswell & Poth, 2016). Tujuan utama dari tinjauan ini adalah mengidentifikasi tren terkini, menelaah tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan arah kebijakan strategis yang dapat mendukung penguatan sistem kesehatan mental nasional. Rumusan masalah dalam kajian ini berfokus pada bagaimana layanan kesehatan mental di Indonesia berkembang dari sisi kebijakan, implementasi di fasilitas kesehatan, penggunaan teknologi digital, serta upaya pemberdayaan masyarakat, sekaligus menilai sejauh mana faktor-faktor tersebut selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Universal Health Coverage* (UHC).

Ruang lingkup kajian mencakup literatur yang relevan dengan kebijakan kesehatan mental, efektivitas intervensi, program promosi dan pencegahan di layanan primer, inovasi berbasis digital, serta isu hak asasi manusia dalam konteks kesehatan jiwa di Indonesia. Sumber data yang dianalisis terdiri atas jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, publikasi organisasi kesehatan dunia, serta artikel akses terbuka yang terbit dalam

kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2025). Pemilihan literatur dilakukan dengan kriteria ketat, meliputi relevansi tema, kualitas metodologis, kontribusi terhadap pemahaman perkembangan layanan kesehatan mental, serta kesesuaian dengan fokus kajian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka mendalam. Artikel yang memenuhi kriteria kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi temuan utama terkait perkembangan kebijakan, implementasi intervensi, tantangan dalam sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung layanan kesehatan mental. Analisis data menggunakan pendekatan sintesis tematik, yaitu dengan mengelompokkan hasil temuan ke dalam beberapa tema besar: kebijakan kesehatan mental, efektivitas intervensi, peran layanan primer dan kader kesehatan, teknologi digital, serta tantangan struktural dan sosial. Dari proses ini diperoleh narasi yang utuh mengenai dinamika dan arah kebijakan kesehatan mental di Indonesia.

Analisis perbandingan juga dilakukan dengan membandingkan literatur yang menggambarkan keberhasilan program, seperti promosi kesehatan mental di Puskesmas atau program penghapusan *pasung*, dengan literatur yang menunjukkan hambatan seperti keterbatasan tenaga kesehatan, stigma sosial, serta risiko penggunaan intervensi digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih seimbang, sekaligus memperlihatkan celah yang masih perlu diperbaiki dalam sistem layanan kesehatan mental.

Untuk memastikan validitas hasil kajian, triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan informasi dari berbagai publikasi yang membahas isu yang sama, baik dari perspektif kebijakan, implementasi, maupun penelitian empiris. Konsistensi dalam pengodean temuan dijaga agar analisis tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir kajian disajikan dalam bentuk narasi yang runtut, terstruktur, dan komprehensif sehingga dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas dalam memahami arah pengembangan layanan kesehatan mental di Indonesia.

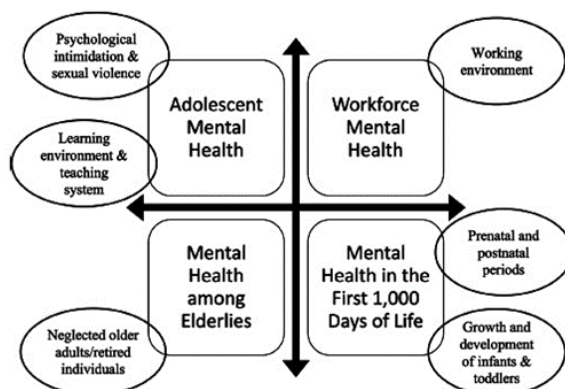
RESULT AND DISCUSSION

Perkembangan layanan kesehatan mental di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Isu kesehatan mental yang sebelumnya kurang mendapat perhatian kini mulai dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan kesehatan nasional. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, serta peran aktif organisasi internasional dalam mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Universal Health Coverage* (UHC). Hasil telaah literatur

menunjukkan bahwa layanan kesehatan mental tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga mencakup pendekatan promotif, preventif, serta integrasi teknologi digital sebagai strategi untuk memperluas akses layanan. Hal ini menjadi tanda bahwa kesehatan mental di Indonesia mulai bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, komprehensif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bagi layanan primer, terutama Puskesmas, kesehatan mental kini ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam pelayanan. Program promosi kesehatan jiwa, deteksi dini, serta pencegahan gangguan mental telah mulai diimplementasikan, meskipun dengan variasi efektivitas di setiap daerah. Puskesmas yang memiliki sumber daya lebih memadai cenderung lebih berhasil dalam menjalankan program tersebut, seperti kegiatan konseling kelompok, penyuluhan masyarakat, dan pembentukan kader kesehatan jiwa. Kader ini berfungsi sebagai penghubung antara fasilitas kesehatan dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan literasi kesehatan mental, mengurangi stigma, serta membantu deteksi dini kasus. Namun, masih banyak Puskesmas yang menghadapi keterbatasan tenaga, fasilitas, maupun obat-obatan sehingga pelayanan belum berjalan optimal.

Penggunaan teknologi digital membuka peluang baru dalam penyediaan layanan kesehatan mental. Aplikasi konseling daring, platform edukasi, hingga layanan berbasis *telemedicine* mulai dikembangkan untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan jiwa secara langsung, khususnya di daerah terpencil. Teknologi digital memungkinkan pasien untuk memperoleh konseling, edukasi, bahkan terapi jarak jauh dengan biaya lebih rendah dan akses yang lebih cepat. Selain itu, data kesehatan digital juga dapat digunakan untuk memetakan tren masalah mental di berbagai wilayah sehingga kebijakan dan program intervensi dapat lebih tepat sasaran. Meski begitu, tantangan terkait kesenjangan akses internet, literasi digital, serta keamanan data pribadi masih menjadi perhatian utama dalam penerapan layanan kesehatan berbasis teknologi.



Gambar 1. 1 *Mental Health Priorities in Indonesia Across Four High-Risk Population Groups*

Selain perkembangan layanan dan pemanfaatan teknologi, penting untuk memperhatikan prioritas kesehatan mental pada kelompok berisiko tinggi.

Gambar *Mental Health Priorities in Indonesia Across Four High-Risk Population Groups* menekankan bahwa isu ini bersifat multidimensional dan tidak bisa disamaratakan, melainkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok.

1. Remaja membutuhkan layanan yang menitikberatkan pada program anti-bullying, konseling sekolah, serta peningkatan literasi kesehatan mental sejak dini untuk mencegah risiko depresi, kecemasan, dan perilaku berisiko.
2. Pekerja memerlukan intervensi berbasis tempat kerja, seperti *employee assistance program* (EAP), pelatihan manajemen stres, serta dukungan kebijakan perusahaan agar produktivitas tetap terjaga seiring dengan kesehatan mental tenaga kerja.
3. Lansia sangat bergantung pada dukungan keluarga, komunitas, serta fasilitas sosial yang memadai. Faktor kesepian, kehilangan pasangan, dan penurunan fungsi fisik sering memperburuk kondisi mental, sehingga layanan berbasis komunitas menjadi sangat penting.
4. Ibu dan anak pada 1.000 hari pertama kehidupan membutuhkan layanan kesehatan mental yang terintegrasi dengan program kesehatan ibu-anak agar perkembangan psikologis dan fisik generasi berikutnya berlangsung optimal.

Dengan demikian, penguatan layanan kesehatan mental di Indonesia harus mempertimbangkan kelompok rentan secara spesifik agar kebijakan dan intervensi benar-benar efektif serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, tantangan yang dihadapi layanan kesehatan mental di Indonesia masih cukup besar. Stigma sosial terhadap gangguan jiwa masih menjadi hambatan utama yang membuat banyak penderita enggan mencari pertolongan. Stigma ini juga berimbas pada rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat bagi individu dengan gangguan jiwa. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga sangat berpengaruh. Jumlah psikiater dan psikolog klinis masih jauh dari ideal, sehingga beban pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi tidak seimbang. Banyak kasus gangguan mental ditangani oleh tenaga kesehatan umum atau perawat tanpa pelatihan khusus, sehingga kualitas intervensi belum sepenuhnya optimal.

Tantangan lainnya adalah lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan mental. Format yang belum seragam serta rendahnya kualitas data membuat evaluasi program sulit dilakukan secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang disusun seringkali kurang berbasis bukti empiris yang kuat. Dari sisi infrastruktur, beberapa daerah masih belum memiliki fasilitas dasar kesehatan jiwa, baik berupa ruang pelayanan khusus maupun ketersediaan obat psikotropika di layanan primer. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Meskipun berbagai kendala tersebut masih ada, arah kebijakan kesehatan mental di Indonesia telah mulai diarahkan pada penguatan layanan primer, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta integrasi dengan sistem kesehatan umum. Pemerintah melalui berbagai regulasi berupaya untuk menjadikan

kesehatan mental sebagai bagian penting dari pembangunan kesehatan nasional. Perencanaan strategis juga mulai dilakukan agar kebijakan selaras dengan komitmen global dalam pencapaian SDGs dan UHC. Upaya ini mencakup pemberdayaan kader, peningkatan literasi masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta dukungan infrastruktur dan pendanaan yang lebih memadai.

Secara keseluruhan, hasil telaah ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan mental di Indonesia berada pada fase transformasi menuju sistem yang lebih terbuka, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan transformasi ini memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari penguatan fasilitas dan SDM, pemanfaatan teknologi digital, penanganan stigma, hingga penguatan sistem data dan *monitoring*. Dengan dukungan ekosistem yang tepat, layanan kesehatan mental di Indonesia tidak hanya akan mampu menjawab tantangan saat ini, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan global.

CONCLUSION

Keseluruhan pembahasan mengenai perkembangan layanan kesehatan mental di Indonesia menunjukkan bahwa isu ini telah mengalami pergeseran signifikan dari persoalan yang selama ini terpinggirkan menjadi salah satu prioritas dalam agenda kesehatan nasional. Perubahan paradigma pelayanan, dari yang berfokus pada institusi menuju pelayanan berbasis komunitas, merupakan langkah awal yang penting dalam memperluas akses serta mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kehadiran kader kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas menjadi bukti nyata bahwa inovasi pelayanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal pelatihan, insentif, dan keberlanjutan program.

Transformasi digital juga menjadi penopang baru dalam ekosistem kesehatan mental. Aplikasi konseling daring, terapi mandiri, dan layanan berbasis *telemedicine* telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, terjangkau, dan mudah diakses, terutama di wilayah terpencil. Namun, keberhasilan adopsi teknologi sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi, infrastruktur, literasi digital, serta perlindungan data pribadi. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko salah penggunaan teknologi justru dapat memperburuk kondisi pasien.

Tantangan klasik seperti stigma sosial dan praktik *pasung* masih menjadi penghambat besar. Stigma membuat individu enggan mencari bantuan, sementara praktik pasung mencerminkan masih lemahnya sistem dukungan keluarga, komunitas, dan fasilitas rehabilitasi. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah kesehatan mental tidak cukup dilakukan melalui pendekatan medis,

melainkan memerlukan intervensi sosial, edukasi, serta penguatan regulasi yang melibatkan berbagai pihak.

Dengan mempertimbangkan tren, tantangan, dan arah kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan layanan kesehatan mental di Indonesia perlu berfokus pada tiga aspek kunci. Pertama, memperluas cakupan layanan berbasis komunitas dengan memperkuat kapasitas tenaga nonspesialis serta mendorong *task-shifting* yang lebih terstruktur. Kedua, mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem kesehatan secara aman, efektif, dan inklusif untuk memperluas jangkauan layanan. Ketiga, menghapus stigma melalui kampanye berkelanjutan, pendidikan publik, serta pelibatan media dan tokoh masyarakat.

Dengan strategi yang menyeluruh, dukungan lintas sektor, serta komitmen pemerintah dalam menyediakan pendanaan dan regulasi yang jelas, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem layanan kesehatan mental yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Arah kebijakan yang selaras dengan komitmen global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Universal Health Coverage* (UHC) akan menjadi fondasi penting bagi tercapainya kesehatan mental yang bukan hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi layanan kesehatan mental di Indonesia akan sangat menentukan kualitas hidup masyarakat serta ketahanan sosial bangsa dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

REFERENSI

Book:

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Journal with DOI:

Basrowi, M., Rahman, A., & Yuliana, T. (2024). Exploring mental health issues and priorities in Indonesia: A narrative review. *BMC Public Health*, 24(5), 1–12. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11748059/>

Efendi, F., Susanti, I. A., Purwaningsih, S., & Kurniati, A. (2022). Stakeholders' perspectives on mental health task-shifting in Indonesia. *BMC Nursing*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00945-8>

Kim, J. W., Park, J., Choi, Y., & Lee, S. (2023). Effectiveness of digital mental health tools to reduce depression and anxiety in LMICs: Systematic review & meta-analysis. *JMIR Mental Health*, 10(5), e10131603. <https://doi.org/10.2196/10131603>

- Mudiyanselage, T., Fernando, P., & Perera, R. (2024). The effectiveness of mental health interventions involving non-specialists and digital technologies: A systematic review. *BMC Public Health*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-17417-6>
- Taher, T., Rahman, S., & Ali, H. (2023). The safety of digital mental health interventions: Systematic review and recommendations. *JMIR Mental Health*, 10(7), e10594135. <https://doi.org/10.2196/10594135>
- Tyas, R., Nugraha, A., & Lestari, P. (2024). Unlocking the mentally ill in Indonesia: An empirical study. *International Journal of Mental Health Systems*, 18(2), 33–47. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11488725/>
- Susanti, I. A., Efendi, F., & Purwaningsih, S. (2024). An exploration of the Indonesian lay mental health workers (cadres). *International Journal of Mental Health Systems*, 18(4), 55–66. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10792806/>
- Widyatmoko, E., Prasetyo, D., & Hidayah, R. (2024). Systematic review: Efektivitas intervensi kesehatan mental di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(3), 1200–1215. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/46182>

Journal without DOI:

- Honey, P. L., Nugroho, A., & Sari, D. (2023). Literature review: Implementation of mental health promotion and prevention efforts at community health centers in Indonesia. *KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 33–42. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/KESMAS/article/view/1011>
- Ihsanuddin, M. R., & Kurniawan, R. (2025). Kajian literatur teknologi digital untuk intervensi kesehatan mental. *Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 7(1), 15–28. <https://journal.uir.ac.id/jurnalsnati/article/view/40578>
- Yusrani, K. G., Handayani, S., & Putri, M. (2023). Tinjauan kebijakan kesehatan mental di Indonesia: Menuju pencapaian Sustainable Development Goals dan Universal Health Coverage. *Jurnal Medika Nusantara*, 5(2), 45–58. <https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/Medika/article/view/281>

Report / Institutional Publication:

World Health Organization. (2022). *Mental Health Atlas 2020 country profile: Indonesia*. Geneva: WHO.
<https://www.who.int/publications/m/item/mental-health-atlas-idn-2020-country-profile>

Additional Reference (Human Rights Study):

Minas, H., Diatri, H., & Susvartri, S. (2009). Mental health in Indonesia: An overview. *International Psychiatry*, 6(2), 16–18.
<https://www.cambridge.org/core/journals/international-psychiatry/article/mental-health-in-indonesia-an-overview/>